

2021



PEMERINTAH PROVINSI NTB

**LAPORAN EVALUASI
PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN 2021
(TRIWULAN IV)**



BAPPEDA PROVINSI NTB
2021

KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Alhamdulillah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan IV Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini dihajatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota pada tahun 2021 dikelola oleh 54 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 46 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (8 Satker Tugas Pembantuan dan 38 Satker Dekonsentrasi) dan 8 Satker Tugas Pembantuan di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 204.963.965.000,-.

Realisasi sampai triwulan IV telah terealisasi Rp. 197.700.082.877,- atau 96,46% dengan realisasi fisik mencapai 99,17%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp70.849.733.000,- dengan realisasi sebesar Rp.69.208.899.655,- atau 97,68% dan realisasi fisik mencapai 98,86%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp.104.032.136.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.101.086.746.015,- atau 97,17% dengan realisasi fisik sebesar 97,83%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTB sebesar Rp.30.082.096.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.27.404.437.207,- atau 91,10% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Dalam penyusunan Laporan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan IV Tahun 2021 ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja pada triwulan berikutnya. Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-nya bagi kita semua.

*Wabillahi taufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Mataram, 2022
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB 

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2021 mendapat alokasi Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 204.963.965.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 54 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 46 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (8 Satker Tugas Pembantuan dan 38 Satker Dekonsentrasi) dan 8 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satker Provinsi untuk triwulan IV sebesar Rp. 204.963.965.000,- terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 70.849.733.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 104.032.136.000,- terdapat penurunan alokasi anggaran tersebut disebabkan karena adanya Refocusing anggaran dan adanya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang diberlakukan oleh Pemerintah. Sedangkan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) sebesar Rp.30.082.096.000,- yang dilaksanakan oleh 8 satker pada 6 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Realisasi sampai triwulan IV dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 170.295.645.670,- atau 97,38% dengan realisasi kinerja fisik mencapai 98,56%, yang terdiri dari dana Dekonsentrasi dengan realisasi sebesar Rp.69.208.899.655,- atau 97,68% dan realisasi kinerja fisik mencapai 98,86%, dan Tugas Pembantuan dengan realisasi sebesar Rp.101.086.746.015,- atau 97.17% dengan realisasi

kinerja fisik 97,94%. Dan untuk satker pemerintah Kabupaten/Kota realisasi triwulan IV sebesar Rp.27.404.437.207,- atau 91,10% dengan kinerja fisik rata-rata mencapai 100%.

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh dua puluh (20) SKPD atau OPD penerima yang terdiri dari 46 Satker terdiri dari 38 Satker Dekonsentrasi dan 8 Satker Tugas Pembantuan. Satker Tugas Pembantuan terdapat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang serta Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Adapun nama-nama SKPD/OPD penerima alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi nama SKPD/OPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan

NO	NAMA SKPD/OPD	JUMLAH SATKER	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN	%	
					KEU.	FISIK
1	DINAS KESEHATAN	6 Satker Dekon	12,150,569,000	11,289,780,474	92.92	96.62
2	BAPPEDA	2 Satker Dekon	478,140,000	467,118,100	97.69	100
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	2 Satker Dekon	391,893,000	388,708,071	99.19	100
4	SEKRETARIAT DAERAH	1 Satker Dekon	762,235,000	761,943,108	99.96	100
5	INSPEKTORAT	1 Satker Dekon	192,028,000	190,635,977	99.28	100
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6 Satker Dekon	2,311,241,000	2,276,953,323	98.52	99.80
8	DINAS KETAHANAN PANGAN	1 Satker Dekon	11,321,327,000	11,270,495,841	99.55	99.93
9	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	5 Satker Dekon	21,725,199,000	21,559,140,796	99.24	99.79
		4 Satker TP	54,532,537,000	52,666,814,623	96.58	94.97
10	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN	1 Satker TP	19,185,746,000	18,198,949,200	94.86	97.81
11	DINAS KOPERASI UKM	1 Satker Dekon	2,239,172,000	2,208,907,000	98.65	91.67

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekon/TP Triwulan IV Ta. 2021

12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 Satker Dekon	1,743,194,000	1,665,355,586	95.53	95.43
13	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1 Satker Dekon	2,927,410,000	2,923,294,000	99.86	100
15	DINAS PERDAGANGAN	2 Satker Dekon	1,496,725,000	1,303,072,044	87.06	100
16	DINAS PERINDUSTRIAN	1 Satker Dekon	1,654,646,000	1,650,545,898	99.75	100
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 Satker Dekon	479,526,000	433,134,400	90.33	100
18	DINAS PEKERJAAN UMUM	2 Satker TP	29,729,119,000	29,649,394,592	99.73	98.96
19	DINAS SOSIAL	5 Satker Dekon	6,589,201,000	6,467,355,637	98.15	99.01
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2 Satker Dekon	4,387,227,000	4,352,459,400	99.21	99.49
		1 Satker TP	584,734,000	571,587,600	97.75	97.81
JUMLAH			174,881,869,000	170,295,645,670	97.38	98.56

Dengan melihat data tabel diatas rata-rata capaian kinerja dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik keuangan maupun fisiknya diatas 90%, dimana alokasi pagu anggaran sebesar Rp.174.881.869.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.170.295.645.670,- atau 97,38% ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau jadwal dan kontrak pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	4
1.3 TUJUAN DAN SASARAN	4
BAB II	6
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2021.....	6
2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2021	6
2.2 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat	8
A. Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi.....	13
a) Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan	24
BAB III	29
REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021.....	29
3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NTB	30
3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB	79
BAB IV	84
PENUTUP	84
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 SARAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi nama SKPD/OPD, Jumlah Satker, Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan	iii
Tabel 2. 1. Target Indikator Pembangunan Tahun 2021	6
Tabel 2. 2 Target Nasional pada Pengembangan Wilayah NTB Tahun 2021	11
Tabel 3. 1 Capaian Raelisasi APBN Tahun 2021 Pada Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/Kota se NTB	30
Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi berdasrkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB tahun 2021 Triwulan IV	54
Tabel 3. 3 Kelompok Penerima Bantuan UPH Tahun 2021	59
Tabel 3. 4 Alokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Prasarana Pengolahan Holtikultura	64
Tabel 3. 5 Alokasi Kelompok Tani Penerima Fasilitas Pengembangan Kawasan Cabai di kabupaten Bima.....	65
Tabel 3. 6 Kelompok Tani penerima Fasilitas Pengembangan Kawasan manggis.....	66
Tabel 3. 7 Nama Kelompok tani, Alamat dan Luas Lahan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Dompu Tahun 2021	67
Tabel 3. 8 Daftar Nama Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Perpipaan Tahun 2021	71
Tabel 3. 9 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB TA. 2021 Triwulan IV	78
Tabel 3. 10 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi NTB TA. 2021 Triwulan IV	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu, yang penyelenggaraannya dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, yang penyelenggaraannya dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Sedangkan Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu pengalokasian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran Kementerian/Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja K/L yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2021 Rp. 204.963.965.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 54 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 46 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (8 Satker Tugas Pembantuan dan 38 Satker Dekonsentrasi) dan 8 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana diatur dalam Bab IV dan Bab IX Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 terkait Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. sedangkan Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui Bappeda dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada menteri/pimpinan lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dilingkup pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan IV tahun anggaran 2021 yang bersumber dari APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) bertujuan sebagai pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut;
2. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik;
3. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut;
4. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan.

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ini mencakup satker-satker organisasi perangkat daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2021

Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar yang dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2021

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pembangunan untuk pemulihan yang terdampak pandemi COVID-19. Tema pembangunan RKP 2021 adalah "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**".

Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan. Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1. Target Indikator Pembangunan Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target Nasional	Target nasional Untuk Nusa Tenggara	Target NTB
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,5	3,12	5,5 - 6,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8-5,1	3,07	3,21
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5–9,0	16,8	11,75
Rasio Gini (nilai)	0,375–0,380		0,365
Indeks Pembangunan Manusia	72,5	-	69,61

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030	-	-	23,55-24,05
--	---	---	-------------

Sumber: RKP Tahun 2021

Arah kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup

1. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

2. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error*, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata.

4. Pembangunan SDM

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk

meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.

6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

7. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata dalam negeri dan secara bertahap ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya, dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE); penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

2.2 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk dalam bagian Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara yang diarahkan untuk mendorong

percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat. Basis keunggulan Wilayah Nusa Tenggara berada pada sektor perikanan dan kelautan yaitu rumput laut, garam, peternakan sapi, perkebunan kopi, pertambangan tembaga, emas, serta pariwisata.

Pada tahun 2021, strategi akselerasi pertumbuhan wilayah dilakukan dengan delapan langkah:

- a. Memfasilitasi pengembangan industri MICE (*Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition*) dan perhelatan olahraga internasional sebagai penggerak sekaligus sarana promosi pariwisata Nusa Tenggara melalui pengembangan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo, sesuai rencana induk (*masterplan*) kawasan pariwisata yang telah disusun;
- b. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, peternakan, perkebunan, serta budidaya tanaman pangan termasuk pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan;
- c. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri kerajinan mutiara dan kain tenun tradisional;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan dan memperkuat koneksi transportasi dengan hub pariwisata internasional utama Bali;
- e. Mengembangkan kawasan perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara;
- f. Mengembangkan kawasan perkotaan untuk mendukung sektor industri dan pariwisata dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
- g. Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Nusa Tenggara;
- h. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.

Sementara itu strategi pemerataan akan dilaksanakan dengan tujuh langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pendidikan keterampilan hidup (life-skills) dan vokasional untuk mempersiapkan partisipasi masyarakat pada sektor-sektor strategis.
3. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang.
4. Menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar khususnya untuk meningkatkan elektrifikasi rumah tangga, akses air minum, dan sanitasi di perdesaan.
5. Mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan.
6. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) pemerintah daerah dan desa dalam mengelola keuangan daerah dan dana desa yang memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing daerah.
7. Menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara termasuk wilayah dengan risiko bencana dan perubahan iklim yang tinggi khususnya ancaman gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Oleh sebab itu, upaya pengurangan risiko bencana pada tahun 2021 dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, serta peningkatan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kearifan lokal dapat dimanfaatkan dalam melakukan revitalisasi sebagai antisipasi ancaman gempa, misalnya dalam bentuk adopsi desain rumah dan bangunan tradisional yang relatif tahan gempa. Prioritas mitigasi bencana diarahkan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata nasional dan kota-kota utama dengan tingkat kepadatan relatif tinggi. Selain itu, upaya pemulihan

kembali pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat dan daerah lainnya di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara akan terus dilanjutkan dan diperkuat.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2021 adalah:

1. Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta
3. Terbukanya lapangan kerja berkualitas,

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Target Nasional pada Pengembangan Wilayah NTB Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,5 – 6,0%
2.	Tingkat Kemiskinan	11,75%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,21%

Sumber: RKP Tahun 2021

Sasaran pembangunan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Untuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan ini, maka pada tahun 2021 belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 serta dampaknya dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 serta mengoptimalkan program dan kegiatan yang dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggungjawabnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan pencapaian, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui optimisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota Triwulan IV yakni dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2021 sebesar Rp. 204.963.965.000,- terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.174.881.869.000,- yang meliputi Dekonsentrasi sebesar Rp.70.849.733.000 dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.104.032.136.000,-. Sedangkan dana tugas pembantuan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu total sebesar

Rp.30.082.096.000. Pelimpahan dan penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

A. Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam negeri tahun anggaran 2021 melalui program peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan desa dengan kegiatan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah dan sub kegiatan melaksanakan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp. 1.283.471.000,-

Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah (Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten /Kota;
- b. Mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.(memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota;
- c. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah;
- d. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan

- e. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan (monev dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (pengawasan capaian SPM).

2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kesehatan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji dengan output yang dihasilkan yaitu Layanan Data dan Informasi, Pengelolaan Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dan Pelayanan Publik Lainnya; serta Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.150.569.000,-

Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan;
- b. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;

- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- e. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar; dan
- f. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayan kesehatan dasar dan rujukan.

3. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2020 tentang pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun Anggaran 2021 melalui program Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 284.932.000,- . Adapun sasarannya untuk meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah dan mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.

4. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor Tahun 2021 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pemantauan produk, Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, dan Program Pelayanan Publik Lainnya, dengan kegiatan dan sub kegiatan meliputi Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, Bantuan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Layanan Data dan Informasi, Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan, Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan, Penyidikan dan Pengujian Penyakit, Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pelayanan Publik kepada lembaga, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Promosi, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut, Sarana Pengembangan Kawasan serta Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, alokasi anggaran sebesar Rp.2.311.241.000,-.

5. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pertanian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 melalui Program Ketersediaan,

Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dengan kegiatan meliputi: Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, Perlindungan Hortikultura, Perbenihan Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 33.046.526.000. adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. Meningkatkan penguatan dan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Meningkatkan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman;
- d. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hortikultura;
- e. Meningkatkan pengembangan sistem perlindungan hortikultura;
- f. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
- g. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- h. Meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- i. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- j. Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak (simurp) untuk peningkatan kapasitas petani;
- k. Meningkatkan kinerja penyuluh;

- l. Meningkatkan layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen;
- m. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- n. Meningkatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- o. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga;
- p. Peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan;
- q. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan
- r. Menjaga pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan/

6. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2021 melalui Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dan sub kegiatan meliputi Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, serta Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.239.172.000. adapun sarannya meliputi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
- b. Memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi;
- c. Memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi;
- d. Memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
- e. Meningkatkan Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi

7. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 melalui Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan kegiatan Pembangunan Desa Dan Perdesaan dan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.743.194.000,-. Adapun sasarannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

8. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2021 melalui Program Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.927.410.000. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan
- c. Peningkatan wawasan pemuda

9. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2021 melalui Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 255.893.000. Adapun sasarannya untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.

10. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Dukungan Manajemen dan Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan output yang dihasilkan Layanan Perkantoran dan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah, dan Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang menghasilkan output Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.496.725.000. adapun sasarannya meliputi:

- a. Mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
- c. Meningkatkan fasilitas pasar lelang daerah;
- d. Mengembangkan fasilitas perdagangan luar negeri di daerah;
- e. Mengembangkan ekspor daerah; dan
- f. Meningkatkan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional di daerah.

11. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perindustrian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 59 Tahun

2020 tentang lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang perindustrian yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dalam Penyelenggaraan dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 melalui Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.654.646.000,-. Adapun sasarannya mencakup:

- a. Meningkatkan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka; dan
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

12. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Perpustakaan Nasional

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.479.526.000,-. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui Perpustakaan; dan
- c. Meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya Perpustakaan.

13. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Sosial

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Sosial telah ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi tahun Anggaran 2021 melalui Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan

Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum dengan output, Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Program Perlindungan Sosial dengan beberapa kegiatan yaitu, Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu, Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat, Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu yang menghasilkan output, Perizinan Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Program Perlindungan Sosial dengan dua kegiatan yaitu, Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana, dengan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Bantuan Kebencanaan, Program Perlindungan Sosial dengan kegiatan yaitu Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial dengan outputnya yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa, serta Program Perlindungan Sosial dengan kegiatan yaitu Penyelenggaraan Program Sembako dan outputnya berupa bantuan keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.589.201.000. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS;
- b. Peningkatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan komunitas adat terpencil, wanita rawan sosial ekonomi, fakir miskin, dan PPKS lainnya;
- c. Peningkatan pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi PPKS termasuk anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta lanjut usia;
- d. Meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau karang taruna dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;

- e. Penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dalam penanganan akibat bencana alam, bencana sosial, serta penanganan terhadap konflik sosial dan teror; dan
- f. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan kesejahteraan sosial;

14. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Tenaga Kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, output yang dihasilkan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Perkantoran, dan Program Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas, Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas dengan output Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.387.227.000,- .

Adapun sarasanya meliputi:

- a. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan keija;
- c. pengembangan standardisasi kompetensi keija dan program pelatihan kerja;
- d. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- e. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.

a) Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan meliputi: Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan, Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan, Pengelolaan produksi tanaman sereal tanaman pangan, Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan, Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Peningkatan produksi buah dan florikultura, Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen hortikultura, Pasca panen, pengolahan (hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan, Penguatan perbenihan tanaman perkebunan, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah, Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen peternakan, Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, Peningkatan produksi pakan ternak, Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, Fasilitasi pupuk dan pestisida, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen prasarana dan sarana pertanian, Pengelolaan air irigasi untuk pertanian, Fasilitasi pembiayaan pertanian, Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat

mesin pertanian, serta Perluasan dan perlindungan lahan pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.718.283.000,- adapun sarannya meliputi:

- a. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- b. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman;
- c. Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- d. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
- e. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
- f. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- g. Meningkatkan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
- h. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
- i. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
- j. Meningkatkan Kinerja Penyuluh

2. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dan output yang dihasilkan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), serta Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air, Layanan

Organisasi dan Tata Kelola Internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.729.119.000,- adapun sasarannya meliputi :

- a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional sebagai kesatuan sistem jaringan jalan

3. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 melalui Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sarana Pengembangan Kawasan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.584.734.000. Adapun sasarannya Pembangunan daerah tertinggal.

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan Dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Republik Indonesia nomor Tahun 2021 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan dan Bantuan Peralatan / Sarana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.949.620.000,-. Adapun sasarannya meningkatkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro).

2. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 melalui Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, Program nilai tambah dan daya saing industri, dan Program dukungan manajemen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.595.850.000,-. Adapun sasarannya meliputi :

- a. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- b. Meningkatkan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak;
- c. Meningkatkan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak;
- d. Peningkatan produksi pakan ternak; dan
- e. Mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan

3. Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 melalui Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Perkara Hukum Kelompok Masyarakat Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.543.876.000,-. Adapun sasarannya penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi.

4. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021 melalui Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan dengan ouput yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.992.750.000, adapun sasarannya meliputi:

- a. Mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
- b. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
- c. Pengembangan sarana distribusi perdagangan;
- d. Peningkatan kapasitas logistic perdagangan.

BAB III

REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

Alokasi dana APBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2021 sebesar Rp.204.963.965.000,- dan sampai triwulan IV telah terealisasi Rp. 197.700.082.877,- atau 96,46% dengan realisasi fisik mencapai 99,17%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.70.849.733.000,- dengan realisasi sebesar Rp.69.208.899.655,- atau 97,68% dan realisasi fisik mencapai 98,86%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.104.032.136.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.101.086.746.015,- atau 97,17% dengan realisasi fisik sebesar 97,83%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.30.082.096.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.27.404.437.207,- atau 91,10% dengan realisasi fisik sebesar 100%, yang dilaksanakan oleh 8 satker pada 6 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat. Terdapat penurunan alokasi anggaran tersebut disebabkan karena adanya Refocusing anggaran dimana anggaran pendapatan belanja negara masih difokuskan pada penanganan Kesehatan dan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dan dunia usaha. Realokasi anggaran pada awal tahun dilakukan untuk mendukung vaksinasi gratis secara bertahap yang dilakukan pemerintah untuk seluruh lapisan masyarakat. Sehingga semua aktivitas masyarakat dapat lebih leluasa untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi,

dan adanya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang diberlakukan oleh Pemerintah.

Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dil lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Triwulan IV Tahun 2021, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Capaian Raaalisasi APBN Tahun 2021 Pada Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/Kota se NTB

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A.	Provinsi	174,881,869,000	170,295,641,670	97.38
	Dekonsentrasi	70,849,733,000	69,208,895,655	97.68
	Tugas Pembantuan	104,032,136,000	101,086,746,015	97.17
B	Kabupaten/Kota	30,082,096,000	27,404,437,207	91.10
	Tugas Pembantuan	30,082,096,000	27,404,437,207	91.10
	Total	204,963,965,000	197,700,078,877	96.46

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2021 (data diolah)

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat alokasi dana dari Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh 46 Satuan Kerja pada Triwulan IV ini terdiri dari 38 Satuan Kerja melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan 8 Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.174.881.869.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 170.295.645.670,- atau 97,68% dan realisasi fisik sebesar 98,35%.

Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan kementerian/lembaga yang dilimpahkan kewenangan dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

A. Dana Dekonsentrasi

1. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 12.150.569.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker. Sampai pada Triwulan IV Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp. 11.2809780.474- atau 92,93% dengan realisasi fisik mencapai 96,62%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

a) Satker 230003 dengan anggaran sejumlah Rp. 258.001.000,- realisasi Keuangannya sebesar Rp.246.759.000,- atau 95,64% dan kinerja fisiknya sebesar 100,00%, dengan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji dengan output yang dihasilkan yaitu Layanan Data dan Informasi, Pengelolaan Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dan Pelayanan Publik Lainnya.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Realisasi perjalanan dinas untuk kegiatan bimbingan teknis SSKOHATKES ke 8 Kabupaten/Kota dan kegiatannya sudah selesai, pembayaran honor petugas SIMAK BMN Selama 12 Bulan, pembayaran honor pengelola Satker Selama 12 Bulan, Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Perencanaan Anggaran Ke Kab/Kota, baru 2 Kab/Kota dan kegiatan Pertemuan Pemutakhiran Data, serta kegiatan belanja bahan untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (dekonsentrasi);

b) Satker 239000 dengan anggaran sejumlah Rp. 2.619.803.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.2.602.419.300,- atau 99,34% dengan kinerja fisik

100,00%, dengan dua program yaitu Program Kesehatan Masyarakat dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat kegiatan beberapa Pembinaan Kesehatan Keluarga, Penyehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat, Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, Penyehatan Lingkungan, Pembinaan Gizi Masyarakat dan Pembinaan Kesehatan Keluarga dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Pelatihan Bidang Pendidikan, Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Pelatihan Bidang Pendidikan, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Sosialisasi dan Diseminasi dan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan. Adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi sehingga Jadwal Pelaksanaan kegiatan tertunda.

- c) Satker 239005 dengan anggaran sejumlah Rp. 1.459.176.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.1.065.546.027,- atau 73,02% dengan kinerja fisik 87,50%, dengan dua program yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer, Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Sosialisasi dan Diseminasi, Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dan Pelayanan Publik Lainnya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Tahap 3 dan tahap 4 dilaksanakan di 2 lokus (Bima dan Dompu), sedangkan kegiatan lainnya sudah selesai dilaksanakan.

- d) Satker 239006 dengan anggaran sejumlah Rp 4.995.206.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.4.797.483.748,- atau 96,04% dengan kinerja fisik 99,71%, dengan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Surveilans dan Karantina Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA,

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Sosialisasi dan Diseminasi, Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal dan Pelayanan Publik Lainnya.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Koordinasi Pelaksanaan Imunisasi Rutin di Kab/Kota, Kegiatan koordinasi Program penyakit infeksi Emerging di Kab/Kota sudah selesai dilaksanakan, Kegiatan Supervisi Suportif Imunisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Sustainability Outreach Service (SOS) di Kab/Kota sebagian besar sudah dilaksanakan, Kegiatan Monitoring Kualitas Data Imunisasi dan Efektivitas Pengelolaan Vaksin di Kab/Kota sudah dilaksanakan, Kegiatan Bimbingan teknis surveilans dan respon KLB/Wabah sudah dilaksanakan di 6 kab/kota sesuai target capaian output, Kegiatan Asistensi dan Bimbingan teknis Provinsi KLB/Wabah sudah dilaksanakan, Penyelidikan Epidemiologi di Kab/Kota, Kegiatan Pra Assesment eliminasi malaria Kab/Kota sudah dilaksanakan dan sudah selesai, beberapa Kegiatan Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit TB di Daerah sudah dilaksanakan, Kegiatan Orientasi Pencegahan dan Pengendalian Depresi, Orientasi Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Mental Emosional dan beberapa kegiatan lainnya mengalami efisiensi anggaran.

- e) Satker 239007 dengan anggaran sejumlah Rp 417.301.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.381.226.799,- atau 91,36% dengan kinerja fisik 100,00%, dengan dua program yaitu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha; Beberapa kegiatan

tersebut telah selesai dilaksanakan seperti kegiatan optimalisasi dan pengujian hasil sampling.

- f) Satker 239008 dengan anggaran sejumlah Rp 2.401.082.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.2.196.345.600,- atau 91,47% dengan kinerja fisik 92,50%, dengan tiga program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dan Program Dukungan Manajemen yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Analisis Perencanaan Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi, pemutakhiran data tk. Fasyankes, Workshop Verifikasi dan validasi data SDMK, dan pembayaran honorarium pengelola keuangan

2. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.283.471.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satker yang terdiri dari 1 Satker pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.193.028.000,- Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.192.028.000,- Sekretariat Daerah dengan alokasi anggran sebesar Rp.762.235.000,- dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.000.000,-. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 484160 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan anggaran sejumlah Rp. 193.208.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.192.779.800,- dengan kinerja fisik 100%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain sosialisasi arah kebijakan DAK Tahun 2022 kepada Kabupaten/Kota, Finalisasi dan pemberian rekomendasi Usulan DAK Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan TP di Kabupaten/Kota, Inventarisasi dan Analisis Data TP di Kabupaten/Kota.

- b) Satker 484161 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 192.028.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 190.635.977,- atau 99,28% dengan kinerja fisik 100%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Capaian SPM Kab/Kota sudah selesai.
- c) Satker 239236 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 762.235.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 761.943.108,- atau 99,96% dengan kinerja fisik 100%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
- d) Satker 433352 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sejumlah Rp. 136.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 135.425.574,- atau 99,58% dengan kinerja fisik 100%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan). Belum dapat dilaksanakan kegiatan karena kesulitan mendapatkan bendahara yang bersertifikat.

3. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 284.932.000,- pada Satker 230020 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), realisasi keuangan sebesar Rp.274.338.300,- atau 96,28% dengan kinerja fisik 100% yang dilaksanakan oleh 1 Satker dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa kegiatan penilaian penghargaan pembangunan daerah kabupaten/kota tahap I dan II se NTB tahun 2021, dan kegiatan fasilitasi kesekretariatan dekonsentrasi (belanja honorarium pejabat pengelola anggaran, belanja fotocopy, belanja penjiilidan, belanja makan minum)

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.311.241.000,- yang dilaksanakan oleh pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.2.276.953.323,- atau 98,52% dengan rata rata realisasi fisik 99,80%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 235221 dengan anggaran sejumlah Rp. 378.795.000,- realisasi keuangannya Sebesar Rp. 378.675.247,- atau 99,97% dengan realisasi fisiknya 100%, dengan satu Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN dan Pengelolaan Data dan Informasi dengan output yang dihasilkan yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal. Kegiatan yang telah terealisasi berupa Realisasi merupakan belanja Honor Operasional Satker , Belanja Barang Persediaan & Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Realisasi merupakan Perjalanan Dinas dalam rangka penyusunan LK &

LBMN ke Satker Lingkup Dislutkan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Realisasi berupa belanja Honor Output Kegiatan dan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengumpulan Data Statistik Kelautan dan Perikanan.

- b) Satker 239065 dengan anggaran sebesar Rp. 244.992.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.244.657.569,- atau 99,86% dengan kinerja fisik 100% dengan dua program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, dan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan dengan output yang dihasilkan yaitu Pemantauan produk Pelayanan Publik Lainnya, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Bantuan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi dan Layanan Data dan Informasi.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Perjalanan dalam rangka koordinasi dengan kab/kota terkait Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pembangunan SPDN, Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi kesyahbandaran, BIMTEK Kesyahbandaran, Honor Kesyahbandaran dan Alat Tulis Kantor, Pelaksanaan kegiatan pelabuhan perikanan, Perjalanan dalam rangka koordnasi PIPP dan Honor PIPP, Honor dan perjalan lokal Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan), Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan), Perjalanan dalam rangka koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan di daerah, Honor petugas perijinan, Honor Petugas logbook, Perjalanan dalam rangka couching statistik perikanan tangkap di Bogor dan Honorarium petugas, Penyusunan statistik perikanan tangkap, dan Honorarium dan penyusunan laporan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

- c) Satker 239066 dengan anggaran sebesar Rp. 1.179.951.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.1.147.540.397,- atau 97,25% dengan kinerja fisik 98,82% yang terdiri dari dua program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan output yang dihasilkan yaitu Penyidikan dan Pengujian Penyakit, Layanan Data dan Informasi, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Pelayanan Publik kepada Lembaga, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: pembelian alat tulis kantor, Pembayaran honorarium petugas IMS dan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi, pembinaan monitoring residu ke kabupaten Lombok Tengah, pembayaran honorarium SMPI dan perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi dan pembinaan monitoring residu bulan Oktober ke Kabupaten Lombok Tengah, perjalanan dinas ke Kabupaten Lombok Barat dalam rangka penilaian dan pembinaan dan pendampingan audit CBIB, pembelian belanja bahan dan pembayaran bandwidth dan pembayaran perjalanan dinas dalam rangka identifikasi program /kegiatan perikanan budidaya ke Kabupaten Dompu, perjalanan dinas ke kabupaten lombok timur dan lombok barat dlm rangka identifikasi program/kegiatan perikanan budidaya yang dilakukan pada bulan Nopember, pembayaran Bandwith dan pembelian alat tulis kantor, dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi menyiapkan sertifikasi hak atas tanah ke Kabupaten Lombok Tengah.

- d) Satker 239067 dengan anggaran sebesar Rp 151.802.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.151.686.100,- atau 99,92% dengan kinerja fisik 100,00% yang terdiri dari dua program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan, dengan output yang dihasilkan yaitu, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Layanan Umum,

Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Pembinaan POKMASWAS dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara, Dukungan kegiatan Bimtek dari Ditjen PPSDK, Pembinaan di Kabupaten Bima dan Kota Bima, Kegiatan Rakernis Pengawasan SDKP di Bandung Jawa Barat, Honorarium Pengelola Anggaran dan ATK Kegiatan, Pembayaran Honorarium Pejabat Pengelola Anggaran Satker, Pengumpulan dan Input data Laporan Kinerja Bulanan dan Triwulan, Pengumpulan Bahan Input data Laporan Persediaan dan SIMMAK BMN, dan Pengumpulan SPJ terkait dengan Belanja Persediaan Untuk dilakukan input ke dalam aplikasi persediaan dan SIMAK BMN, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pokmaswas, Penyusunan terhadap dokumen finalisasi anggaran program pengawasan SDKP dan Monev kegiatan pengawasan SDKP dan Penyusunan Laporan Tahunan Kinerja Pengawasan SDKP.

- e) Satker 239068 dengan anggaran sebesar Rp 143.871.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.143.870.440,- atau 100% dengan kinerja fisik 100% yang terdiri dari tiga program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan, Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan output yang dihasilkan yaitu, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Menghadiri Rakortek di Depok dan Rakernis di Bandung, Jawa Barat, Perjalanan dinas ke Kabupaten Bima dalam rangka koordinasi kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil ke DKP Kabupaten dan menemui pokmaswas setempat, Melaksanakan Survey untuk pelaksanaan kegiatan Peran Serta Masyarakat Konservasi Perairan,

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi peningkatan peran serta masyarakat kawasan konservasi di Sumbawa, Melakukan survey ke TPK Kebete di Kabupaten Sumbawa untuk penyusunan SOP Pengelolaan Kawasan Konservasi, Melakukan perjalanan dinas dalam rangka penyusunan SOP Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ke Sumbawa, Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka jejaring dan kemitraan konservasi keanekaragaman hayati laut, Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dengan DKP Kabupaten Lombok Barat dan Pokmaswas di TWP Gita Nada terkait kemitraan keanekaragaman hayati laut, Melakukan koordinasi dengan instansi setempat di Kabupaten Bima serta melakukan peninjauan lapangan, dan Pelaksanaan kegiatan rapat Penyusunan RANPERGUB Usaha Garam Rakyat dengan instansi terkait.

- f) Satker 239069 dengan anggaran sebesar Rp 211.830.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.210.523.570,- atau 99,38% dengan kinerja fisik 100% yang terdiri dari tiga program yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, Program Kualitas Lingkungan Hidup yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan, Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut, dengan output yang dihasilkan yaitu, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Sarana Pengembangan Kawasan, Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Menghadiri Rakortek di Depok dan Rakernis di Bandung, Jawa Barat, Perjalanan dinas ke Kabupaten Bima dalam rangka koordinasi kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil ke DKP Kabupaten dan menemui pokmaswas setempat, Melaksanakan Survey untuk pelaksanaan kegiatan Peran Serta Masyarakat Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi peningkatan peran serta masyarakat kawasan konservasi di Sumbawa, Melakukan survey ke TPK Kebete di Kabupaten Sumbawa untuk

penyusunan SOP Pengelolaan Kawasan Konservasi, Melakukan perjalanan dinas dalam rangka penyusunan SOP Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ke Sumbawa, Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka jejaring dan kemitraan konservasi keanekaragaman hayati laut, dan Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dengan DKP Kabupaten Lombok Barat dan Pokmaswas di TWP Gita Nada terkait kemitraan keanekaragaman hayati laut, dan penyusunan laporan pembahasan dalam rangka penyusunan Ranpergub Tata Kelola Garam Provinsi NTB.

5. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 33.046.526.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker yang terdiri dari 5 Satker pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.725.199.000,- dan 1 satker pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp 11.321.327.000. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.32.829.636.637,- atau 99,34% dengan rata rata realisasi fisik 99,86%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239009 dengan anggaran sebesar Rp 2.938.927.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.923.515.850,- atau 99,48% dengan kinerja fisik 99,94%, yang terdiri dari tiga program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni, Perlindungan Hortikultura, Perbenihan Hortikultura, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura, dengan output yang dihasilkan yaitu, Sarana Pengembangan Kawasan, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemantauan produk, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Sertifikasi Produk, Data dan Informasi Publik.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Fasilitasi Pengendalian OPT Hortikultura 12 Ha, berupa bahan pengendali Ramah lingkungan untuk gerakan pengendalian Sayur dan Buah, Fasilitasi Bantuan Sarpras Klinik PHT/PPAH, Berupa alat2 dan bahan klinik, pendampingan dan pengawalan pengendalian OPT Hortikultura, pelaksanaan penerapan PHT dilaksanakan di 2 kelompok Tani, yaitu mekar sari kelurahan sayang-sayang kecamatan Cakranegara kota mataram (komoditas cabe) dan Kelompok Tani beruik sadar 1 desa santong. Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara (komoditas bawang merah). honor pengelola dan insentif petugas pengawas benih tanaman (PBT), honor output kegiatan mantri tani, monev ke kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur, honor operasional satuan kerja, ATK dan bahan komputer, dan honor output kegiatan mantri tani, monev dan evaluasi ke kabupaten Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur dan Lombok Barat, honor operasional satuan kerja dan realisasi PBT (Pengawas Benih Tanaman) ATK dan bahan komputer.

- b) Satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp 1.713.145.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.1.672.943.625,- atau 97,65% dengan kinerja fisik 100%, yang terdiri dari dua program yaitu, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian, yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan yakni, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, dengan output yang dihasilkan yaitu, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pelayanan Publik kepada masyarakat, Layanan Perkantoran dengan output yang dihasilkan yaitu, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pelayanan Publik kepada masyarakat, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan dan Pelayanan Publik Lainnya.

Kegiatan yang telah terealisasi berupa supervisi dan pembinaan Kegiatan Teknis Lingkup Air di Kabupaten P. Sumbawa dan P. Lombok, Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi di 4 Kabupaten pulau Sumbawa (KSB, Sumbawa, Dompu, Bima), Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan

Koordinasi di 7 Kabupaten (Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima), penetapan SK Admin eRDKK telah ditetapkan dengan Nomor: 821.29/Sarpras.28.a/Distanbun. Kegiatan perjalanan dinas dilakukan untuk pendampingan Evaluasi Kartu Tani di Lombok Utara dan Lombok Tengah, Kegiatan perjalanan dinas dilakukan untuk pendampingan Evaluasi Kartu Tani di Lombok Utara dan Lombok Tengah, Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi, dan Pelaksanaan Kegiatan administrasi keuangan serta Koordinasi Percepatan dan Pembinaan pengawasan ke Kabupaten/kota. Pembinaan monitoring dan Pengolahan Air dan Irigasi telah selesai dilaksanakan, identifikasi LKMA di 10 Kabupaten/Kota.

- c) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp.5.747.083.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 5.694.689.047,- atau 99,09% dengan kinerja fisik 100% yang terdiri dari satu Program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat dua kegiatan yaitu Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan beberapa output yang dihasilkan yaitu, Sertifikasi Produk, Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, Sarana Pengembangan Kawasan, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kegiatan yang telah dilaksanakan Monev dan pendampingan gerdal OPT ke kabupaten/kota, Verifikasi CPCL kegiatan perlindungan tanaman pangan TA. 2022 dan Pembayaran biaya operasional satuan kerja rutin.
- d) Satker 239072 dengan anggaran sebesar Rp.671.758.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.669.377.200,- atau 99,65% dengan kinerja fisik 100%, yang terdiri dari dua Program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen, dengan dua kegiatannya yakni Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan menghasilkan output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Kegiatan operasional laboratorium lapangan berupa Pelatihan Perbanyak dan Penyebaran APH di Kelompok Tani Ngiring Maju Desa Ganggalang KLU sebanyak 25 orang, Kegiatan Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT sebanyak 33 orang, Kegiatan Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) Perkebunan sebanyak 10 orang, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 1 layanan berupa

- Pengolahan data statistik (Provinsi & Kabupaten) sebanyak 12 orang
- Monitoring dan evaluasi
- Insentif Mantri Statistik Perkebunan sebanyak 116 orang
- Pertemuan Sinkronisasi Data Perkebunan sebanyak 22 orang

Koordinasi pengendalian OPT ke Kab. Lombok Utara, Insentif petugas pelaporan OPT Provinsi dan Insentif petugas pengamat OPT sebanyak 33 orang, Insentif petugas BPT sebanyak 5 org dan Honor Regu Pengendali OPT (RPO) sebanyak 20 orang, Konsultasi/menghadiri pertemuan ke Pusat/Provinsi lainnya masih menunggu jadwal undangan dari pusat, Monitoring dan evaluasi program/kegiatan ke Pulau Lombok dan Sumbawa sebanyak 6 Kabupaten, Insentif Mantri Statistik sebanyak 116 Orang x 1 kali, Pengumpulan data statistik perkebunan ke pulau lombok dan Sumbawa sebanyak 10 kab/kota, dan Pertemuan Sinkronisasi Data Perkebunan sebanyak 22 orang.

- e) Satker 239224 dengan anggaran sebesar Rp 10.654.286.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 10.598.615.074,- atau 99,48% dengan kinerja fisik 99,03%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan satu kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang menghasilkan output atau keluaran yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pembayaran BOP Penyuluh, Pembayaran honor THL TBPP, perjalanan konsultasi pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluh swadaya, bahan praktek penerapan teknologi CSA padi dan non padi untuk 16 kelompok tani dari total 144 kelompok tani, Kegiatan Dukungan penerapan CSA sudah terlaksana 100 %, Kegiatan Workshop High Value Crop sedang dalam tahap CPCL.

Kegiatan Pusat Data dan informasi sudah membuat display/papan informasi dan setiap lokasi kegiatan (6 BPP) sudah membayar langganan internet sebanyak 6 bulan. Kegiatan Pusat Gerakan Pembangunan Kecamatan Komponen A sudah memasang papan/Plang BPP. Kegiatan Pusat Pembelajaran Komponen A dalam proses perencanaan. Kegiatan Pusat Konsultasi Agribisnis Komponen A sudah melaksanakan pengadaan running Text untuk menyediakan informasi pasar dan sedang menyusun materi HVC setelah kegiatan HVC selesai dilaksanakan. Kegiatan Pusat Pengembangan Kemitraan Komponen A dalam proses persiapan. Kegiatan Administasi BPP Komponen A sudah terlaksana 100 %. Kegiatan Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca

Kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh Kegiatan SIMURP telah dilaksanakan. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan SIMURP komponen A akan dilaksanakan pada bulan Desember. Kegiatan Penumbuhan Calon Pengusaha tani sedang dalam tahap CPCL. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Usaha SIMURP Komponen A akan dilaksanakan bulan agustus, serta penyusunan RKA SIMURP sebanyak 2 kali di provinsi, biaya fasilitasi rutin sudah dicairkan seperti ATK dan Fotocopy. Kegiatan percontohan penerapan teknologi pertanian di kabupaten sumbawa dengan target 10 Kelompok tani komoditas jagung, Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian di kabupaten Lombok Barat Komoditas padi Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian di kabupaten sumbawa barat komoditas padi (Inpari 32), Pembayaran BOP bulan desember 2021 untuk penyuluh pns, Pembayaran BOP dan Honor THLTB-PP bulan desember 2021.

- f) Satker 239220, Satker pada di Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 11.321.327.000,- dan realisasi keuangannya sebesar Rp.11.270.495.841,- atau 99,55% dengan kinerja fisiknya 99,93%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan terdapat beberapa kegiatan yaitu, Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan yang menghasilkan beberapa output yaitu, Pengawasan dan Pengendalian Produk, Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Data dan Informasi Publik.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pembayaran honor enumerator panel harga, Honor Enumerator Panel Harga dan Pasokan pangan, Pelaksanaan Gelar Pangan Murah dan Promosi TTIC, Pembayaran Honor Petugas TTIC, serta pelaksanaan Gelar Pangan Murah, Pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan pada kegiatan GPM, Fasilitasi Distribusi Pangan pada pelaksanaan GPM di Kabupaten/Kota, Identifikasi potensi dan melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertanian keluarga serta dilaksanakan pembinaan ke lokasi di Kabupaten Lombok timur, Pendampingan kabupaten ke kelompok dan pemantauan pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan pemerintah Pertanian Keluarga, Melaksanakan pertemuan kelompok dan pembinaan ke kelompok, Pelaksanaan monitoring stok pangan pokok strategis oleh kabupaten/kota dan pengolahan data akses pangan, Monitoring Pangan Strategis serta pemantauan stok penggilingan dan harga di pedagang, Pembuatan Video Publikasi PK serta pembinaan kelompok, Pelaksanaan Talk Show Seminar Pangan Lokal dan Keamanan Pangan pada Festival Pangan Lokal, Uji laboratorium Pangan Segar Asal Tumbuhan beserta pengiriman sampel, Pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan rapat dengan tim, Pelaksanaan penyusunan PPH pada triwulan IV, Melaksanakan koordinasi pengawasan keamanan pangan segar ke BKP Kementan, Pertemuan koordinasi kelembagaan keamanan pangan, uji laboratorium pangan segar asal tumbuhan dan pelaksanaan surveilen, Pengambilan sampel dan pembelian rapid test kit, Pencairan bantuan pemerintah P2L Tahap Penumbuhan sebanyak 6 kelompok di kabupaten Sumbawa, Lombok Barat dan Sumbawa Barat, Pencairan bantuan pemerintah P2L Tahap Penumbuhan sebanyak 43 kelompok serta dilakukan pembinaan baik oleh provinsi maupun kabupaten/kota, Pencairan bantuan pemerintah P2L Tahap Penumbuhan sebanyak 39 kelompok, Pencairan bantuan pemerintah P2L

Stunting di Kota Mataram sebanyak 4 kelompok, Pengadaan bahan promosi gerakan diversifikasi pangan, Pelaksanaan Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal, dan Pengadaan bahan promosi, sosialisasi gerakan diversifikasi pangan lokal.

6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.239.172.000,- yang berada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230046 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan IV Tahun anggaran 2021 sebesar Rp.2.208.907.000,- atau 98,65% dengan realisasi fisiknya 91,67%, yang terdiri dari satu program yaitu, Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembayaran perjalanan dinas ke Kab/Kota dalam rangka monev program strategis koperasi dan UMKM tahun 2021, Pembayaran bahan ATK kegiatan pendataan Koperasi dan UKM, Pembayaran honorarium Tim Pokja enumerator data Koperasi dan UKM, pembayaram honorarium konsultan PLUT, Pembayaran honorarium pejabat pengelola anggaran dan bahan ATK, Pembayaran perjalanan dinas ke Yogyakarta dalam rangka rapat koordinasi bidang Koperasi dan UMKM, dan Pembayaran honorarium SA/SPG bulan Mei 2021 dan terpromosinya produk unggulan Provinsi NTB.

7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp1.743.194.000, yang berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 350333 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan IV Tahun anggaran 2021

sebesar Rp.1.665.355.586,- atau 95,53%, dengan realisasi fisiknya 95,63%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi dengan Keegiatannya Pembangunan Desa dan Perdesaan dengan output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: Pembayaran Honorarium Staff Sekretariat P3MD Existing, Pembayaran Honorarium Pejabat dan Pengelola Dana Dekonsentrasi, Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang, Belanja bahan dan keperluan kantor lainnya (ATK dan Bahan Komputer), Pelaksanaan sewa Kantor TAPM Kabupaten Lombok Utara untuk 1 tahun anggaran, Melakukan perjalanan dinas dalam rangka : Koordinasi dan Konsultasi Revisi RKAKL TA 2021, asistensi administrasi pertanggungjawaban atas operasional kantor dan verifikasi kantor TAPM Kabupaten, dan Pelaksanaan Belanja sewa 2 unit mobil untuk TPP dan Satker Provinsi. Pembayaran Operasional Tenaga Ahli Provinsi dan Kabupaten sampai bulan desember 2021, kegiatan Rapat Evaluasi Dana Desa tahun 2021.

8. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.927.410.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230071 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan IV Tahun anggaran 2021 sebesar Rp.2.923.294.000 atau 99,86%, dengan kinerja fisiknya 100% yang terdiri dari dua program yaitu Program dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat. Keegiatannya yang telah terealisasi belanja konsumsi dan honorarium PPLP Nusa Tenggara Barat.

9. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 255.893.000,- dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu

Satker 230024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi keuangan sebesar Rp.253.282.497,- atau 98,98% dengan kinerja fisik juga 100% dengan Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya pengawasan sebanyak 54 perusahaan antara lain: Kabupaten Lombok Utara sebanyak 3 perusahaan, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 7 perusahaan, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 9 perusahaan, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10 perusahaan, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 5 perusahaan, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 3 perusahaan, dan Kabupaten Lombok Utara sebanyak 9 perusahaan. Telah dilaksanakan pemantauan dan pengawasan sebanyak 8 Perusahaan:

Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 3 perusahaan antara lain :

1. PT. Twinys Kuta Cottage
2. PT. North East Development
3. PT. Sea Indonesia Investments

Kabupaten Lombok Barat sebanyak 2 Perusahaan antara lain :

1. PT. Lombok Sutton
2. PT. Indah Homestay Senggigi

Kabupaten Sumbawa Barat 3 perusahaan

1. PT. Bukit Samudra Sumbawa
2. Bawa Wali Wallage
3. Private Sanctuary Indonesia

10. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.496.725.000,- pada Dinas Perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 Satker yaitu Satker 239029 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 449.149.000,- dan Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.047.576.000,- Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.1.303.072.044,- atau 87,06% dengan rata rata realisasi fisik 100,00%.

Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a. Satker 239029, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 449.149.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 418.283.200,- atau 93,13% dengan kinerja fisik 100,00%, dengan dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah dengan output yang dihasilkan Layanan Perkantoran dan Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah;
- b. Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.047.576.000,- dengan realisasi keuangan 884.788.844,- atau 84,46% dengan rata rata realisasi fisik 100,00% dengan satu program yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang menghasilkan output Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya kegiatan perlindungan konsumen di Kabupaten Lombok Barat, kegiatan pasar murah, Terbentuknya data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Terbentuknya data stok barang kebutuhan pokok, kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok menjelang Puasa dan Lebaran 2021, Terselenggaranya kegiatan Pasar Lelang di Mataram, perjalanan dinas dalam rangka identifikasi pembeli dan penjual potensial, dan kegiatan Bimtek Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT).

11. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.654.646.000, pada Dinas Perindustrian dengan dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 239033 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.654.646.000,- atau 74,60% dan realisasi fisik sebesar 100% yang terdiri dari satu program yaitu Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka, yang menghasilkan output Fasilitas dan Pembinaan Industri.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Bimtek WUB Pengolahan pangan bagi Kabupaten Bima yang diikuti oleh 20 ikm, Kegiatan Rakor Perindustrian dan Dekranasda se Provinsi NTB, TPL-IKM Kementerian Perindustrian, dan Bimtek Penyamakan Kulit bagi IKM Kabupaten Bima, TPL-IKM Nusa Tenggara Barat.

12. Perpustakaan Republik Indonesia

Perpustakaan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.479.526.000,-, pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dilaksanakan oleh satu satker yaitu 230038 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 378.966.400,- atau 90,33% dengan kinerja fisik sampai triwulan IV sudah mencapai 100%, dengan satu program yaitu Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga. Kegiatan yang telah terlaksana yaitu kegiatan 4 lomba; dan kegiatan sosialisasi jabatan fungsional pustakawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

13. Kementerian Sosial

Kementerian Sosial mengalokasikan dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.589.201.000,- yang dilaksanakan oleh 5 Satker, pada Dinas Sosial. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.6.467.355.637,- atau 98,15% dengan rata rata realisasi fisik 99,01%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 230017, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp 205.055.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 202.320.000,- atau 98,67%, dengan pencapaian realisasi fisiknya 100%, yang terdiri dari satu program yaitu, Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum dengan output, Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Penyusunan Perencanaan Program

dan Anggaran, Dekonsentrasi Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal, dan Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi

- b) Satker 239020 dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp 891.974.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 883.106.000,- atau 99,01% dengan kinerja fisik 100%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Perlindungan Sosial dengan beberapa kegiatan yaitu, Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan, Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu, Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat, Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu yang menghasilkan output, Perizinan Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah, Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
- c) Satker 239023, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.3.445.352.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.3.418.215.037,- atau 99,21% dan kinerja fisik 99,55%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Perlindungan Sosial dengan dua kegiatan yaitu, Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana, dengan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Bantuan Kebencanaan;
Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa assessment bantuan bencana sosial kebakaran di kabupaten Sumbawa, Kegiatan pengerahan pskbs tahun 2021, dan biaya operasional pendamping pkh di 10 kab/kota se-ntb sebanyak 1.159 orang dan Pembayaran honor dan ATK kegiatan.
- d) Satker 418854, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.183.740.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.183.740.000,- atau 100,00% dan kinerja fisik telah mencapai 100,00%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Perlindungan Sosial dengan kegiatan yaitu Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial dengan outputnya yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa;
Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pembayaran Operasional Penyuluh sosial Masyarakat, Pembayaran Operasional Perkantoran, dan Suvervisi Relawan di 15 Desa yang berada di Kabupaten Lombok Barat, dan

Pembayaran Operasional Perkantoran dan Supervisi Relawan di 5 Desa yang berada di Kabupaten Lombok Barat

- e) Satker 418974, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.1.863.080.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.1.779.974.600,- atau 95,54% dan realisasi fisik yaitu 95,51%, yang terdiri dari satu program yaitu Program Perlindungan Sosial dengan kegiatan yaitu Penyelenggaraan Program Sembako dan outputnya berupa bantuan keluarga. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pelaksanaan Rapat Koordinasi PFM Pertama Tingkat Provinsi telah dilaksanakan di Kota Mataram.

14. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.4.387.227.000, pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi oleh 2 Satker. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.4.352.459.400,- atau 99,21% dengan rata rata realisasi fisik 99,49%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239028, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.474.570.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.463.480.000,- atau 97,66% dan realisasi fisik yaitu 98,98%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, output yang dihasilkan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Perkantoran; Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Pemeriksaan norma kerja dan norma jamsostek dalam kota, Pemeriksaan dan penanganan kasus norma kerja dan jam sosotek di pulau lombok, Pemeriksaan dan penanganan kasus norma kerja,norma jamsostek dan dokter penasehat, Koordinasi penanganan pandemi covid-19, dan Pembinaan norma ketenagakerjaan bagi perusahaan secara virtual dan penanganan covid 19.
- b) Satker 239225, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp. 3.912.657.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.3.888.979.400,- atau

99,39% dan realisasi fisik yaitu 100%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas, Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas dengan output Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Kegiatan Pelatihan Untuk angkatan 1 Sedang Di Lembaga, Kegiatan Magang di Industri untuk angkatan 1, dan Kegiatan Pelatihan Untuk angkatan kedua Sedang Di Lembaga, dan Kegiatan Sedang Berjalan Untuk Paket Ke 2 di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 5 Perusahaan. Kegiatan tahap pertama dan kedua sudah selesai dan proses laporan akhir sudah selesai.

Untuk mengetahui lebih jelas capaian realisasi keuangan dan kinerja fisik dana Dekonsentrasi Satker dilingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Dekonsentrasi berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB tahun 2021 Triwulan IV

No.	Kode Satker	Nomenklatur Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Anggaran	% Fisik
1	239236	Skretariat Daerah	762,235,000	761,943,108	99.96	100
2	484160	Bappeda	193,208,000	192,779,800	99.78	100
3	484161	Inspektorat	192,028,000	190,635,977	99.28	100
4	433352	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	136,000,000	135,425,574	99,58	100
5	239071	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	5,747,083,000	5,694,689,047	99,09	100
6	239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	2,938,927,000	2,923,515,850	99.48	99.94
7	239072	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	671,758,000	669,377,200	99.65	100

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekon/TP Triwulan IV Ta. 2021

No.	Kode Satker	Nomenklatur Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Anggaran	% Fisik
8	239011	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	1,713,145,000	1,672,943,625	97.65	100
9	239224	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	10,654,286,000	10,598,615,074	99.48	99.03
10	239220	Dinas Ketahanan Pangan	11,321,327,000	11,270,495,841	99.55	99.93
11	239033	Dinas Perindustrian	1,654,646,000	1,650,545,898	99.75	100
12	230003	Dinas Kesehatan	258,001,000	246,759,000	95.64	100
13	239000	Dinas Kesehatan	2,619,803,000	2,602,419,300	99.34	100
14	239005	Dinas Kesehatan	1,459,176,000	1,065,546,027	73.02	87.50
15	239006	Dinas Kesehatan	4,995,206,000	4,797,483,748	96.04	99.71
16	239007	Dinas Kesehatan	417,301,000	381,226,799	91.36	100
17	239008	Dinas Kesehatan	2,401,082,000	2,196,345,600	91.47	92.50
18	239028	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	474,570,000	463,480,000	97.66	98.98
19	239225	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,912,657,000	3,888,979,400	99.39	100
20	230017	Dinas Sosial	205,055,000	202,320,000	98.67	100
21	239020	Dinas Sosial	891,974,000	883,106,000	99.01	100
22	239023	Dinas Sosial	3,445,352,000	3,418,215,037	99.21	99.55
23	418974	Dinas Sosial	1,863,080,000	1,779,974,600	95.54	95.51
24	418854	Dinas Sosial	183,740,000	183,740,000	100.00	100
25	235221	Dinas Kelautan dan Perikanan	378,795,000	378,675,247	99.97	100
26	239065	Dinas Kelautan dan Perikanan	244,992,000	244,657,569	99.86	100

No.	Kode Satker	Nomenklatur Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Anggaran	% Fisik
27	239066	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,179,951,000	1,147,540,397	97.25	98.82
28	239067	Dinas Kelautan dan Perikanan	151,802,000	151,686,100	99.92	100
29	239068	Dinas Kelautan dan Perikanan	143,871,000	143,870,440	100.00	100
30	239069	Dinas Kelautan dan Perikanan	211,830,000	210,523,570	99.38	100
31	230046	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2,239,172,000	2,208,907,000	98.65	91.67
32	230020	Bappeda	284,932,000	274,338,300	96.28	100
33	230038	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	479,526,000	433,134,400	90.33	100
34	230024	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	255,893,000	253,282,497	98.98	100
35	350333	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1,743,194,000	1,665,355,586	95.53	95.43
36	239077	Dinas Perdagangan	1,047,576,000	884,788,844	84.46	100
37	239029	Dinas Perdagangan	449,149,000	418,283,200	93.13	100
38	230071	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2,927,410,000	2,923,294,000	99.86	1.00
TOTAL			70,849,733,000	69,208,899,655	97.68	98.86

B. Dana Tugas Pembantuan

1. Kementerian Pertanian dan Perkebunan

Kementerian pertanian dan Perkebunan mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.73.718.283.000,- yang dilaksanakan oleh 5 Satker, yang terdiri dari 4 Satker pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 54.532.537.000,- dan 1 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar

Rp.19.185.746.000,-. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp. 70.865.763.823,- dengan rata rata realisasi fisik 97,49%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

a. Satker 239126, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.20.441.735.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.19.923.178.511,- atau 97,46% dengan kinerja fisik 94,04%, yang terdiri dari tiga program yaitu 1)Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, 2)Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, 3)Program Dukungan Manajemen dengan beberapa kegiatan didalamnya yaitu sebagai berikut : Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan yang menghasilkan output yaitu Sertifikasi Produk, Sarana Pengembangan Kawasan'Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.

1). Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Hasil kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Sertifikat Produk Tanaman Pangan

Kegiatan sertifikasi produk tanaman pangan terdiri dari pengujian 3 komoditas utama tanaman pangan yaitu : Pengujian mutu beras : 2 sample, Pengujian mutu jagung : 10 sample, Pengujian mutu kedelai : 2 sample

b. .Koordinasi Bimtek Monev dan Pelaporan

1. Pengawasan Sarana Pasca Panen

Pengawasan bangunan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota dan Lokasi untuk pembangunan UPH oleh kelompok perlu dilakukan.

Pembiayaan untuk bangunan berupa transfer rekening ke kelompok dan pengerjaan bangunan harus sesuai dengan RAB yang telah dibuat sebelumnya. Dana yang diberikan sebesar Rp. 50 juta per kelompok. Jika pembangunan melebihi dana tersebut, dibiayai secara swadaya oleh kelompok tani.

2. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Pasca Panen

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana pasca panen yang diberikan pada tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya dan pembinaan terhadap pemanfaatan alat-alat tersebut. Alat-alat pasca panen antara lain berupa bantuan sarana pascapanen, bantuan dryer dan RMU dan pengawalan hibah terhadap alat yang sudah diberikan. Hasil Kegiatan : Dari hasil monitoring yang telah dilakukan terhadap sarana pasca panen yang diserahkan pada tahun 2021, pemanfaatan alat belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, sebagai berikut : a). Penyaluran bantuan yang kurang tepat waktu, b) Spesifikasi alat yang disalurkan dirasa kurang tepat oleh beberapa kelompok c) Kelompok penerima sebagian besar adalah petani dengan modal terbatas sehingga tidak ada biaya operasional dan pemeliharaan alat, d) Petani kebanyakan meminta bantuan alat pasca panen yang mobile untuk memudahkan dalam pemindahan dan pengangkutan alat, antara lain corn sheller mobile maupun power thresher mobile, e) Bantuan dryer di NTB sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal karena rata-rata kapasitas kerja dibawah 1 ton/hari pada musim panen sementara alat dryer yang diberikan berkapasitas 6 – 10 ton. Sehingga dianggap kurang efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu. Beberapa kelompok juga tidak bisa mengoperasikan dryer yang diberikan sehingga banyak yang tidak terurus dan alatnya dimakan tikus.

Pembinaan dan Pengawalan Sarana Pengolahan Tanaman Pangan

Pembinaan dan pengawalan Unit Pengolahan Tanaman Pangan jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya yang dilakukan ke Kabupaten/Kota penerima bantuan yang berada di Kabupaten Lombok Utara, Lombok

Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima dengan Hasil sebagai berikut yang terdapat dalam tabel dibawah ini;

Tabel 3. 3 Kelompok Penerima Bantuan UPH Tahun 2021

No	Nama Kelompok/ Ketua	Alamat	Jenis Bantuan
1	KWT Rukun	Desa Kopang Rembiga Kopang Lombok Tengah	Paket Pembuat Emping Jagung
2	KWT Melati Putih	Desa Montong Kecamatan Utan Sumbawa	Paket Pembuat Jagung Marning
3	Poktan Tampeng Karya	Desa Senyur Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur	Paket Pembuat Pakan Ternak
4	Poktan Kejar Rahmat	Desa Suka Damai Kecamatan Manggalewa Dompu	Paket Pembuat Pakan Ternak
5	Poktan Melet Maju	Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah	Paket Pembuat Tahu
6	KWT Batu Nampar	Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa	Paket Pembuat Tahu
7	Poktan Tiga Putra	Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu	Paket Pembuat Tahu
8	Poktan Ganda Suli Bangkong	Desa Sambik Elen Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara	Paket Pengolah Porang
9	LSM HISDI	Jl. Pemuda Nomor 28 Kelurahan Rite Kecamatan Raba Kota Bima	Paket Pengolah Sorgum

Disamping melakukan pengawalan, dilakukan juga pembinaan kepada kelompok tani penerima bantuan UPH sebelumnya, antara lain :

- Gapoktan Sinar Mas Desa Mas Mas Kecamatan Batukliang Utara dengan ketua kelompok HM Nasir. Alat UPH yang diperoleh adalah alat pengolahan pakan ternak tahun 2020. Pengolahan pakan ternak tetap berjalan secara kontinyu dengan kapasitas 1 ton per minggu. Komposisi yang digunakan untuk pakan ayam petelur adalah jagung (75 kg) : konsentrat (50 kg): dedak (25 kg).
- Kelompok Tani Pilos Sejahtera Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat adalah penerima bantuan UPH Jagung Tahun 2019.

Perkembangan UPH tersebut sampai saat ini masih eksis dan alat yang diberikan juga masih digunakan.

c. Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan

- Pelayanan Petugas Informasi Harga Hasil Tanaman Pangan

Hasil kegiatan :

- Penyampaian data dari petugas PIP di 7 (tujuh) kabupaten selama tahun 2021 berjalan lancar.
 - Laporan rekapan hasil perkembangan harga 7 komoditi tanaman pangan terdapat pada laporan khusus PIP.
- .Koordinasi Peluang Usaha Ekspor dan atau Substitusi Impor Produk Tanaman Pangan
- Kegiatan Panen Perdana Sorgum dan Peluang Ekspor dan atau Substitusi Impor Komoditi Tanaman Pangan di Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di Kelompok Tani Jujur Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021. Diikuti oleh 300 peserta dengan luas pertanaman seluas 275 Ha. Benih yang digunakan adalah benih bantuan dari pusat dan ada Sebagian dari Litbang yaitu Bioguma I Agritan.
 - Kegiatan Pertemuan Sosialisasi Peluang Usaha dan Potensi Ekspor dan Atau Substitusi Impor Komoditi Sorgum di Kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan di Kelompok Tani Genem Desa Dangiung Kecamatan Kayangan hari Kamis tanggal 9 November 2021.

d. Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan

Melaksanakan Penyaluran Sarana Pascpanen Tanaman Pangan.

- Melaksanakan Penyaluran Sarana Perontok/Pemipil
- Bantuan sarana Perontok/Pemipil tahun 2021 berupa:
- Power Thresher sebanyak 30 Unit
 - Corn Sheller sebanyak 40 Unit
 - Corn Sheller Mobile sebanyak 16 Unit
 - Power Thresher Multiguna sebanyak 6 Unit
 - Power Thresher Multiguna Mobile sebanyak 5 Unit

- Sarana Dryer/Pengering
- Kegiatan sarana Dryer/Pengering berupa
- UV Dryer sebanyak 1 unit
- Sarana RMU/Revitalisasi RMU
- Kegiatan sarana RMU berupa
- Husker dan Polisher sebanyak 2 unit

Semua bantuan sarana pascapanen diperuntukkan bagi kelompok tani/gapoktan dan UPJA.

e. Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Bantuan fasilitasi pengolahan hasil tanaman pangan tahun 2021 sebanyak 9 unit dengan rincian 4 unit UPH Jagung (2 kelompok untuk pakan ternak), 3 unit UPH kedelai (pembuat tahu) dan 2 UPH untuk Komoditi Lainnya (Porang dan Sorgum).

2). Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang meliputi:

- a. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan
Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan berupa pengembangan Kawasan Kedelai yang semula dialokasikan seluas 4.000 Ha (Reguler) dan 42.750 Ha (Pemulihan Ekonomi Nasional) sehingga total seluas 46.750 Ha;
- b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan yang berupa bantuan sarana produksi untuk Padi Kaya Gizi (Padi Biofortifikasi) seluas 2.000 Ha dan Pengembangan Sorgum seluas 500 Ha;
- c. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan
 - Kegiatan Pemberdayaan Petani Penangkar Benih Tanaman Pangan (P3BTP) Benih Padi Inbrida
Kegiatan P3BTP komoditas benih padi inbrida dilaksanakan dengan pola transfer uang yaitu Belanja barang untuk Bantuan Lainnya yg memiliki karakteristik bantuan pemerintah, dimana kelompok tani yang menjadi sasaran diberikan bantuan berupa uang untuk membeli saprodi kegiatan P3BTP tersebut.
 - Kegiatan Penyaluran Benih Padi Inbrida/Areal Penyaluran Benih Padi

Program bantuan benih padi atau kegiatan penyaluran benih padi satker Tugas Pembantuan (TP) pada tahun 2021 terdiri dari 2 jenis, yaitu reguler dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Kegiatan bantuan benih padi pada tahun 2021 ini sangat terbatas hanya seluas 2.781 Ha yang terdiri dari 103 Ha reguler di Kabupaten Lombok Barat dan 2.678 Ha di Kabupaten Bima. Sedangkan kabupaten lain tidak mendapatkan alokasi yang disebabkan oleh adanya revisi DIPA dimana kuota benih padi ditarik ke pusat.

- Kegiatan melaksanakan Penyaluran Benih Jagung Hibrida

Bantuan benih jagung hibrida tahun 2021 dengan total luas 18.098 Ha (271.470 Kg) yang dibagi dalam dua jenis bantuan yaitu Reguler seluas 3.700 Ha dan PEN seluas 14.398 Ha, yang tersebar kepada 5 kabupaten yaitu ; Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur dan Lombok Tengah, sedangkan kabupaten/kota lain tidak dapat alokasi karena keterbatasan kuota yang diberikan setelah mengalami pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dan ditarik ke pusat.

3). Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan yang dikelola oleh bagian perbendaharaan adalah alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pendukung kegiatan utama.

- b. Satker 239127 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.221.250.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.1.195.234.440,- atau 97,87% dan realisasi fisiknya 92,50% yang terdiri dari, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan Program Dukungan Manajemen dengan beberapa kegiatan didalamnya yaitu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan output yang dihasilkan yaitu, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sarana Pengembangan Kawasan, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.

Adapun kegiatan yang telah terealisasi berupa perjalanan dinas, Kegiatan persiapan Sarana Pengolahan Hortikultura, Kegiatan fasilitasi bantuan, dan Realisasi Honor Operasional Satuan Kerja.

1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Hasil kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Sarana Pengolahan Hortikultura

Kegiatan Sarana Pengolahan Hortikultura dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sarana pengolahan hortikultura berupa alat/ mesin sarana pengolahan seperti Perajang Bawang, Spiner, Continues Seller, Penggorengan, Tabungan Gas, Keranjang, Timbang digital, Kemasan plastic sesuai usulan atau kebutuhan kelompok tani/ Gapoktan/ Kelompok Wanita Tani dan pelaku usaha yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi CPCL oleh Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota. Adapun Hasil monitoring dan evaluasi oleh petugas provinsi didampingi oleh petugas Kabupaten Bima Kelompok penerima Bantuan Sarana Pengolahan Hortikultura yaitu : Kelompok Wanita Tani NIKITA Ketua Nurjanah Desa Lido Kecamatan Belo, adalah setelah didistribusikan sarana pengolahan hortikultura berupa alat dan mesin pengolahan bawang merah di Kelompok Wanita Tani Nikita Desa Lido Kecamatan Belo sudah dimanfaatkan dengan jenis olahan bawang goreng dan rencana kedepannya akan dikembangkan pisang kriuk.

b. Sarana Pemasaran Hortikultura

Penerima manfaat dari kegiatan pembelian produk petani adalah adalah kelompok tani/ GAPOKTAN, yang produknya mengalami hambatan dalam distribusinya, over produksi dan harga jual yang rendah serta permintaan yang menurun di kawasan dan atau lokasi sentra produksi hortikultura yang menangani pemasaran secara terus menerus. Produk yang dibeli dari dari kelompok tani/ GAPOKTAN tersebut selanjutnya didistribusikan ke konsumen/ masyarakat.

c. Prasarana Pengolahan Hortikultura

Bantuan Fasilitasi Prasarana Pengolahan Produk Hortikultura di 3 (tiga) Kelompok Wanita Tani yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten, seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 4 Alokasi Kelompok Tani Penerima Bantuan Prasarana Pengolahan Holtikultura

No	Nama Kelompok Tani	Alamat	Komoditas
1.	NIKITA	Desa Lido Kecamatan Belo Kab. Bima	Bawang merah
2.	Raka La Rangga	Desa Kandai II Kecamatan Woja Kab. Dompu	Bawang merah
3.	Bunga Mekar	Desa Majidi Kec Selong Kab. Lombok Timur	Cabai

2). Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat. Hasil kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Kawasan Bawang Merah

Kegiatan ini berbentuk pengembangan kawasan khusus komoditi bawang merah, yang dialokasikan seluas 35 Ha di Kabupaten Bima. Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah mencakup kegiatan Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi/ Bimbingan Teknis.

b. Kawasan Aneka Cabai

Kegiatan ini berbentuk pengembangan kawasan khusus komoditi cabai (rawit) varietas Sreet yang dialokasikan seluas 25 Ha di Kabupaten Bima kepada 2 kelompok tani. Kegiatan Pengembangan Kawasan Aneka Cabai mencakup kegiatan Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi/ Bimbingan Teknis, Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. K Adapun penjabaran kegiatannya sebagai berikut :

- Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi/Bimbingan Teknis

Kegiatan ini meliputi perjalanan identifikasi CPCL ke Kabupaten Bima yang ditunjuk dan koordinasi dengan kabupaten untuk menentukan kelompok tani penerima bantuan. Dari hasil identifikasi dan koordinasi di

lapangan bersama petugas kabupaten diperoleh data kelompok tani penerima bantuan sarana pengembangan kawasan aneka cabai.

Kelompok tani penerima bantuan yang ditunjuk sebanyak 2 kelompok tani yang tersebar di 2 kecamatan dengan pembagian antara lain : Donggo sebanyak 1 kelompok dengan luas tanam 13 Ha dan Tambora sebanyak 1 kelompok dengan luas tanam 12 Ha, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 5 Alokasi Kelompok Tani Penerima Fasilitas Pengembangan Kawasan Cabai di kabupaten Bima

No	Kelompok Tani	Alamat	Ketua
1.	Piri Rora II	Desa Rora, Kecamatan Donggo	Bunyamin
2.	Sandaka	Desa Oi Bura, Kecamatan Tambora	Kamarudin

- Pelaksanaan (Fasilitas Bantuan Sarana Produksi)

Fasilitas bantuan kepada petani merupakan pengadaan dan pendistribusian bantuan sarana dan prasarana pengembangan kawasan aneka cabai kepada kelompok tani yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian.

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini mencakup monitoring, evaluasi kegiatan dan pelaporan. Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan di lokasi pertanaman cabai di masing-masing kelompok tani pada bulan Juli 2021. Petani mulai mempersiapkan lahan dan melaksanakan persemaian pada bulan Juni.

c. Kawasan Buah

1. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Kampung Buah tersebut didukung dengan adanya sub-sub kegiatan lainnya meliputi koordinasi, Identifikasi, Verifikasi dan Validasi CPCL ke lokasi, fasilitas bantuan sarana produksi dan Pendampingan / pengawalan kegiatan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya Pengembangan Kampung Buah manggis yang memenuhi skala ekonomi, berdaya saing dan berorientasi ekspor.

- Terbentuknya Kampung Buah Manggis seluas 40 Ha dan Kampung Buah Alpukat seluas 20 Ha.

Adapun kelompok tani yang mendapat alokasi bantuan sarana pengembangan manggis dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Kelompok Tani penerima Fasilitas Pengembangan Kawasan manggis

No	Kelompok Tani	Alamat	Ketua	Luas (Ha)
1.	Hitam Manis	Desa Buwun Sejati, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat	Ruslan	10
2.	Kontanyembao	Desa Karang Bayan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat	Sumadi	10
	Jumlah Lombok Barat			20
3.	Buak Tebel	Desa Pemepek, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah	Nuripansyah	6
4.	Pade Angen	Desa Pemepek, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah	Seman	4
5.	Mele Maju	Desa Setiling, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah	Aidil Tahta	6
6.	Sinar Rinjani	Desa Setiling, Kec. Batukliang Utara, Kab. Lombok Tengah	Lalu Wira Suandana	4
	Jumlah Lombok tengah			20

Dari hasil monitoring setelah bibit/benih manggis ditanam per Bulan Nopember 2021 jumlah tanaman yang masih hidup sebanyak 373 pohon.

3). Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan yang dikelola oleh bagian perbendaharaan adalah alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pendukung kegiatan utama,

- c)** Satker 239128, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.451.057.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.4.299.881.602,- atau 96,60% dan realisasi fisik 98,82%, yang terdiri dari dua Program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen dengan beberapa kegiatan didalamnya yaitu Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan, Penguatan

Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan output yang dihasilkan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sarana Pengembangan Kawasan, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Sertifikasi Produk, Promosi, Standarisasi Produk, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal.

1). Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar. Hasil kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Sarana Pengolahan Hortikultura

Pengembangan Tembakau Virginia

Sasaran kegiatan Pengembangan Tembakau Tahun 2021 adalah 80 Ha yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kabupaten Lombok Tengah 20 Ha, Kabupaten Lombok Timur 40 Ha, Kabupaten Dompu 20 Ha, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 7 Nama Kelompok tani, Alamat dan Luas Lahan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Dompu Tahun 2021

No.	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Alamat			Nama Ketua Klp	Total Petani (Org)
			Desa	Kec.	Kab.		
1	Mekar Sari	10,00	Saba	Janapria	Loteng	Badrin Islam	10
2	Dayama	10,00	Lekor	Janapria	Loteng	Irawadi	10
	Jumlah Loteng	20,00					20
1	Beriuk Tinjal II	10,00	Padamara	Sukamuliana	Lotim	Mastar	11
2	Jati Suara	10,00	Sukarara	Sakra Barat	Lotim	Sahrin	21
3	Terenyuk	10,00	Sukarara	Sakra Barat	Lotim	Amburawan	10

4	Gelanggal Karya IV	10,00	Gelanggal	Sakra Barat	Lotim	Abd. Rahman	10
	Jumlah Lotim	40,00					52
1	Karang Juli Maju II	10,00	Kadindi	Pekat	Dompu	Hindianto	10
2	Beriuk Mele 1	10,00	Pekat	Pekat	Dompu	Rifaid	10
	Jumlah Dompu	20,00					20
	Total	80,00					92

b. Penyediaan Prasarana pengolahan Tanaman Perkebunan

Sasaran dari kegiatan Fasilitasi Prasarana Pengolahan Hasil Kopi adalah Poktan/Gapoktan dan kelompok masyarakat lainnya.

Kegiatan Pendampingan dan Pengawasan Prasarana Pengolahan Kopi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur dengan melaksanakan pendampingan, pengawasan dan Monitoring serta Evaluasi pada setiap tahapan/proses pelaksanaan kegiatan Sarana Fasilitasi Pengolahan Hasil Kopi di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

c. Penyediaan Fasilitasi Prasarana Pengolahan Kopi untuk Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

Melaksanakan rangkaian proses kegiatan fasilitasi Penyediaan Prasarana mengacu pada Petunjuk pelaksanaan (Juklak) kegiatan yang disusun oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB yang mengacu pada pedoman teknis pusat. Setiap Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Prasarana Pengolahan Kopi dilaksanakan secara bersama – sama dengan berkoordinasi dengan Bidang yang menangani Perkebunan pada Dinas pertanian Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Melaksanakan Verifikasi pada calon lokasi/calon petani pada Kelompok Tani yang akan difasilitasi Prasarana Pengolahan Kopi di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Melaksanakan Sosialisasi pada kelompok tani yang akan difasilitasi sarana pascapanen kopi di kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Kelompok Penerima Prasarana

Fasilitasi Pengolahan Kopi di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur adalah:

- Kelompok Wanita Tani (KWT) Suli Asli, Desa Aik Berik Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah
- Kelompok Tani (KT) Sembalun Hijau, Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Lawang Kabupaten Lombok Timur.

d. Penyediaan Prasarana Pascapanen Kopi

Adapun tujuan daripada kegiatan Fasilitasi Prasarana Penanganan pascapanen kopi adalah : Tersedianya Prasarana Pascapnen Kopi pada kelompok tani sasaran. Sasaran dari kegiatan Fasilitasi Prasarana pascapanen kopi adalah Tersedianya bahan biji kopi (gren bean) yang bermutu, serta meningkatnya jumlah hasil panen. Kelompok Penerima Penyediaan Prasarana Pascapanen Kopi yaitu 1) Kelompok Tani “Rimba Rinjani” Dusun Talon Ambon Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah 2) Kelompok Tani “Sinar Utama” Dusun Lantan Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

e. Penyediaan Sarana Pascapanen Kopi Lombok Tengah

tujuan daripada kegiatan Fasilitasi Sarana Penanganan pascapanen kopi adalah Tersedianya Sarana Pascapnen Kopi pada kelompok tani sasaran. Sedangkan sasaran dari kegiatan Fasilitasi sarana pascapanen kopi adalah : Tersedianya bahan biji kopi (gren bean) yang bermutu, serta meningkatnya jumlah hasil panen. Kelompok Penerima Penyediaan sarana Pascapanen Kopi yaitu 1) Kelompok Tani “Rimba Rinjani” Dusun Talon Ambon Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah 2) Kelompok Tani “Sinar Utama” Dusun Lantan Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

2). Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan yang dikelola oleh bagian perbendaharaan adalah alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pendukung kegiatan utama

d). Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.418.495.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp.27.248.520.070,- atau 95,88% dan realisasi fisik

94,43% yang terdiri dari dua Program yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen dengan beberapa kegiatan didalamnya yaitu Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan output yang dihasilkan, Pelayanan Publik Lainnya, Layanan Perkantoran, Pelayanan Publik kepada masyarakat Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Pengembangan Kawasan, OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

1). Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian. Hasil kegiatan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (Upland); Kegiatan UPLAND adalah sebagai momen perubahan dan menjadi batu loncatan bagi seluruh masyarakat pertanian. Dimana ini merupakan awal dari pelaksanaan model pengembangan pertanian terpadu yang terintegrasi khususnya di daerah dataran tinggi. Selain itu, aspek lingkungan juga tidak boleh dilupakan di mana sistem pertanian yang dibangun harus mengutamakan kaidah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian kegiatan UPLAND ini menjadi suatu kegiatan yang dapat diharapkan mengharmonisasikan semua aspek tersebut. Sehingga target agar kegiatan ini dapat menjadi success story dan teladan yang dapat direplikasi pada kegiatan pertanian lainnya pada masa yang akan datang.

b. Irigasi Perpipaan (PEN)

Kelompok penerima bantuan pemerintah kegiatan perpipaan tersebar di 4 (empat) Kabupaten. Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan dana pemerintah berjumlah 10 kelompok tani, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 8 Daftar Nama Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Perpipaan Tahun 2021

NO	Nama Kelompok	Nama Ketua	Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Volume (Unit)	Keterangan
1	Tempos Salak	Nasiun	Mekar Sari	Suela	Lotim	1	Tanaman Pangan
2	Borne I	Nihin	Bebidas	Wanasaba	Lotim	1	Tanaman Pangan
3	Sabar menanti II	Abdul Hanan	Pringga Jurang Utara	Montong Gading	Lotim	1	Tanaman Pangan
4	Beriuk Demen	Lalu Masri	Seteling	Batukliang Utara	Loteng	1	Tan. Hortikultura
5	Bareng Angen	Akmaludin	Aik Buka	Batukliang Utara	Loteng	1	Tan. Hortikultura
6	Mekar Bersatu	Mahrup	Karang Sidemen	Batukliang Utara	Loteng	1	Tan. Hortikultura
7	Orong Sokal	Bagus Firdaus	Tatebal	Lenangguar	Sumbawa	1	Tanaman Pangan
8	Satoyang	M. Sirad	Lenangguar	Lenangguar	Sumbawa	1	Tanaman Pangan
9	Nyaman Ate	Haerudin	Batu Dulang	Batulanteh	Sumbawa	1	Tanaman Pangan
10	Sori Panca II	Syamsudin	Kawinda Nae	Tambora	Bima	1	Tanaman Pangan
Jumlah						10	

c. Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Tengah (PEN)

Kelompok penerima bantuan pemerintah kegiatan perpompaaan besar wilayah tengah tersebar di 8 (delapan) Kabupaten berjumlah 20 kelompok tani. Kegiatan perpompaaan ini terdiri dari dua jenis yakni perpompaaan besar wilayah tengah sebesar Rp. 123.000.000,- dan perpompaaan menengah wilayah tengah sebesar Rp. 88.000.000,-

d. Jaringan Irigasi Tersier (PEN)

Kelompok penerima bantuan pemerintah kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota. Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan dana pemerintah berjumlah 140 kelompok tani.

2). Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan yang dikelola oleh bagian perbendaharaan adalah alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pendukung kegiatan utama

e). Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.185.746.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.198.949.200,- atau 94,86% dengan realisasi pencapaian fisiknya 100%,-. Terdapat beberapa program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan 'Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Dukungan Manajemen dengan beberapa kegiatan yaitu Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak, Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Peningkatan Produksi Pakan Ternak, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak. Adapun hasil kegiatannya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tahun 2021 untuk kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak teralokasi anggaran sebesar Rp. 815.982.000 dengan realisasi sebesar Rp. 813.298.500 (99,67%), dan realisasi fisik (100%). Terdapat 3 sub kegiatan dalam kegiatan ini, yaitu :

a) Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yakni :

- Pembinaan dan pendampingan pembiayaan

Dalam rangka pembinaan dan pendampingan pembiayaan Tahun 2021 dilaksanakan Pertemuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan Dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) yang dilaksanakan di kawasan klaster 1000 Desa Sapi di Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Dengan jumlah peserta sebanyak 30.

- Pembinaan dan Pendampingan Investasi
Kegiatan pembinaan dan pendampingan inventasi dilaksanakan di 10 Kabupaten/Kota, dengan melakukan pemetaan potensi-potensi investasi yang dapat dikembangkan.
 - Identifikasi Potensi Produk dan Pelaku Usaha Ekspor Peternakan
 - Koordinasi Pemanfaatan Kapal Ternak
 - Pembinaan/Pendampingan Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan
 - Pembinaan/Pendampingan Usaha Peternakan dan Kemitraan
 - Pelayanan Informasi Harga Komoditas Peternakan
- b) Sarana dan Prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Tahun 2021 untuk kegiatan Sarana dan Prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan teralokasi anggaran sebesar Rp. 380.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 378.981.500 (99,73%), dan realisasi fisik (100%). Terdapat 2 kegiatan yakni sertifikasi organik produk pangan asal ternak dan pasar ternak.
- Pertama kegiatan sertifikasi organik produk pangan asal ternak meliputi bantuan Peralatan pengolahan hasil Peternakan dan fasilitasi prasarana pupuk organik kepada KTT. SPR Ridho Ilahi
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- a. Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak
- Tahun 2021 Kegiatan peningkatan produksi pakan ternak teralokasi pagu anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.147.795.000,- atau (99,81 %), untuk realisasi fisik kegiatan yaitu 100 %. Adapun rincian kegiatannya adalah Bantuan sarana berupa Pembangunan Bank Pakan di 2 lokasi total pagu Rp. 720.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 718.600.000,- (99,81%) atau realisasi fisik 100 % yang dialokasikan di 2 kelompok yaitu : (1) KTT Sepakat desa tangga kecamatan Monta Kabupaten Bima dan (2) KTT Hisdi Desa Rite Kelurahan Raba Kota Bima. Untuk Kegiatan Pengembangan Pakan Hijauan Pakan Ternak Sapi Potong, di 6 lokasi di kab. Lobar, Loteng, KLU, KSB, Dompus dan Bima, total pagu sebesar

Rp. 400.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 399.645.000,- (99,91) dan realisasi fisik 100 %.

b. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan pada satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tahun 2021 teralokasi anggaran sebesar Rp. 387.500.000,- realisasi kegiatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 387.085.500,- atau sebesar 99,89 Persen. Sementara realisasi fisik kegiatan yaitu sebesar 100 persen. Pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yaitu :

- 1) Pencegahan dan pengamanan penyakit rabies
- 2) Pencegahan dan pengamanan penyakit Anthrax
- 3) Fasilitasi Puskesmas

c. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

Kegiatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak pada satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tahun 2021 teralokasi anggaran sebesar Rp. 16.105.991.000,- realisasi kegiatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.133.431.600,- atau sebesar 93,96 Persen. Sementara realisasi fisik kegiatan yaitu sebesar 100 persen. Pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yaitu : Optimalisasi Reproduksi, Ternak Ruminasia Perah dan ternak ruminasia potong.

d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Tahun 2021 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Hewan Veteriner teralokasi anggaran sebesar Rp. 424.700.000,- dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp. 416.827.400 atau (98,15%). Adapun beberapa sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner adalah sebagai berikut : 1.Sertifikasi Unit Usaha, 2. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 3. Penyidikan dan Pengujian Produk

3. Program Dukungan Manajemen, dengan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Layanan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2021,

meliputi layanan perencanaan, layanan perbendaharaan internal, layanan pengelolaan barang milik Negara, layanan data dan informasi dan layanan pemantauan dan evaluasi.

2. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.729.119.000,- yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.29.649.394.200,- atau 99,73% dengan rata rata realisasi fisik 98,96%.

Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239234, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.469.675.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.23.466.414.200,- atau 99,99% dengan fisik 100% yang terdiri dari dua program yaitu Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan, Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. Hasil kegiatannya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pengelolaan Sumber daya air diarahkan pada Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA berupa pemeliharaan Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat sepanjang 949 Km, dengan rincian Daerah Irigasi (DI) Remeneng Komplek Lobar (22,26 Km), DI Pengga Lobar (60,38 Km), DI Mujur Loteng (31,72 Km), DI Batujai Loteng (37,72 Km), DI Surabaya Loteng (22,34 Km), DI Jurang Sate Hulu Loteng (70,21 Km), DI Jurang Sate Hilir (96,13 Km), DI Jurang Batu Loteng (43,91 Km), DI Katon Kompleks Loteng (82 Km), DI Tanggek Komplek Lotim (85,81 Km), DI Pandanduri Suangi Lotim (100,10 Km), DI Batu Bulan Sbw (95,73 Km), DI Mamak Kakiang Sbw (93,23 Km), DI Rababaka Komplek Dompou (23,69 Km), DI Katua Komplek Dompou (17,10 Km). Biaya pemeliharaan mencakup 1) Operasi rutin ke 16 DI; 2) Pemeliharaan Rutin ke 16 DI; 3) Pemeliharaan berkala ; 4) Honorarium

untuk petugas OP sebanyak 230 orang. Adapun pengadaan mencakup pengadaan jas hujan, sepatu lapangan, senter cas pada DI Batu Bulan, DI Mamak, DI Rababaka, DI Katua Kompleks, dan DI Pelaparado. Sedangkan kegiatan pemeliharaan mencakup:

- Pemeliharaan Saluran Daerah Irigasi Jurang Sate Hilir (Ruas BPY. 0-1)
- Pemeliharaan Saluran Daerah Irigasi Mamak-Kakiang (Ruas BNG.12-BNG.14)
- Pemeliharaan Saluran Daerah Irigasi Mamak-Kakiang (Ruas BK.4 BKT.5)
- Pemeliharaan Saluran Daerah Irigasi Mamak - Kakiang (Ruas BNG.9-BNG.11)
- Pemeliharaan rutin (Rambasan) pada semua Daerah Irigasi di Wilayah Lombok, Sumbawa dan Bima.

Capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat secara rata-rata sebesar 98,86% dengan realisasi keuangan mencapai 99,38%, dengan rincian realisasi fisik pada satker 239237 mencapai 100% dan realisasi keuangan 98,78% dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, sedangkan realisasi fisik pada satker 239234 mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,99% dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

- b) Satker 239237, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.259.444.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.182.980.392,- atau 98,78% dengan fisik 97,92% yang terdiri satu program yaitu Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dan output yang dihasilkan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan).

Kegiatan yang telah dilaksanakan Proses trial penghamparan material dan Realisasi fisik 100% dan jalan sudah dimanfaatkan. Hasil kegiatannya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Penyelenggaraan jalan diarahkan pada Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional berupa Preservasi Jalan yang tersebar di dalam wilayah Kota Mataram, yang meliputi Jl. Sudjono (4,30 Km), Jl Sudirman (2,56 Km), Jl. Energi (1,33 Km), Jl. Raya Banjar Getas (2,01 Km), Jl, TM Rais (2,14 Km), Jl. Teguh Faisal (2,84 Km), Jl. TGH. Ali

Batu (1,28 Km), Jl. A. Yani (3,73 Km), Jl. Adi Sucipto (3,70 KM), Jl. Saleh Sungkar 2 (1,51 Km) dan Jl. Saleh Hambali (2,41) dengan total sepanjang 28,32 Km.

3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Program dan kegiatan Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 (satker 350327) dilakukan dalam rangka mendukung arah kebijakan serta pencapaian sasaran dan prioritas nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman melalui Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa terutama pada kawasan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.584.734.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 350327, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.571.587.600,- atau 97,75% dan realisasi fisik 97,81% yang terdiri dari dua Program yaitu Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang menghasilkan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sarana Pengembangan Kawasan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat.

Adapun kegiatan yang telah direalisasikan diantaranya perjalanan dinas Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Trans Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi; Rapat di Kabupaten Sumbawa, Lombok Tengah dan Lombok Timur, Seleksi Transmigran di Kabupaten Loteng, Lotim, Lobar dan KLU, Pembinaan Mental Spiritual berupa Insentif Da'i Pembina, Asst Da'i Pembina dan Petugas Kebersihan di KTM Labangka Kabupaten Sumbawa, dan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian SHM. Kegiatan Fasilitasi pengurusan sertipikat Hak Milik Transmigrasi sudah selesai dilaksanakan.

Belanja Honor Operasional Satker (Honor KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, SAI BMN).

Untuk mengetahui lebih jelas capaian realisasi keuangan dan kinerja fisik dana Tugas Pembantuan Satker dilingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3. 9 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB TA. 2021 Triwulan IV

No.	Kode Satker	Nomenklatur Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Fisik
1	239126	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	20,441,735,000	19,923,178,511	97.46	94.04
2	239127	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	1,221,250,000	1,195,234,440	97.87	92.50
3	239128	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	4,451,057,000	4,299,881,602	96.60	98.92
4	239133	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	28,418,495,000	27,248,520,070	95.88	94.43
5	239129	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	19,185,746,000	18,198,949,200	94.86	100.00
6	239234	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	23,469,675,000	23,466,414,200	99.99	100.00
7	239237	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	6,259,444,000	6,182,980,392	98.78	97.92
8	350327	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	584,734,000	571,587,600	97.75	97.81
PEMERINTAH PROVINSI			104,032,136,000	101,086,746,015	97.17	97.94

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi dana APBN dari Kementerian/Lembaga sebanyak 4 Kementerian/Lembaga pada Triwulan IV sebesar Rp.30.082.096.000,- dengan realisasi sebesar Rp.27.404.437.207,- atau 91,10% dan rata-rata realisasi fisiknya 100%, yang dilaksanakan oleh 6 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Satker yaitu Kabupaten Lombok Barat sebanyak 2 Satuan Kerja, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1 Satuan Kerja, Kabupaten Sumbawa sebanyak 1 Satuan Kerja, Kota Mataram 1 Satuan Kerja, Kabupaten Bima sebanyak 2 Satuan Kerja dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 Satuan Kerja.

Adapun Departemen/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan mengalokasikan dan tugas pembantuan sebesar Rp. 7.949.620.000,- yang dilaksanakan oleh 3 Satker, pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.7.888.236.200,- atau 99,23% dengan rata rata realisasi fisik 100%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239242, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.545.313.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.530.130.000,- atau 99,02% sementara realisasi fisik sebesar 100%. Adapun Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan;
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa honor operasional satker, Biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi kegiatan pusat, Biaya

perjalanan dinas dalam kota Sosialisasi daerah, Pengadaan Geomembran, Dokumen perencana lahan integrasi pergaraman, Dokumen pekerjaan konsultan perencana saluran, dan Dokumen pekerjaan konsultan perencana jalan produksi.

- b) Satker 230340, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.545.313.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.499.112.200,- atau 97,01% dan fisik masih 100%. Adapun Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa belanja operasional kegiatan, dan kegiatan lahan integrasi pergaraman.

- c) Satker 239050, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.858.994.000,- pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bima, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.858.994.000 atau 100% dan realisasi fisik 100%. Adapun Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan dan Bantuan Peralatan / Sarana.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Dukungan administrasi kegiatan Usaha Garam Rakyat, dan Pembangunan / Rehabilitasi Saluran / PIPANISASI Tambak Desa.

2. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp. 595.850.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dengan kode satker 230576 dan dengan realisasi keuangan sebesar Rp.528.821.875,- atau 88,75% sementara fisik 100%. Adapun Programnya adalah Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dan outputnya Sarana Pengembangan Kawasan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa Sosialisasi Ke Kelompok Tani, dan Perjalanan Dinas dan Belanja bahan dalam Persiapan Sarana Pengembangan Bawang Merah. Sedangkan kegiatan fisik masih dalam proses tender.

3. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp. 7.543.876.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima dengan kode satker 350329 dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.537.933.000,- atau 99,92% dan realisasi fisik 100%. Adapun Programnya adalah 'Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan output Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Perkara Hukum Kelompok Masyarakat Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan).

Kegiatan yang telah direalisasikan diantaranya Fasilitasi Pendidikan, Kesehatan dan Mental Spiritual, Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi, dan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan (dalam proses).

4. Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mengalokasikan dana tugas pembantuan sebesar Rp. 13.992.750.000,- yang dilaksanakan oleh 3 Satker pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram. Pada Triwulan IV Tahun anggaran 2021 telah direalisasikan sebesar Rp.11.449.446.132,- atau 81,82% dengan realisasi fisiknya 100%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a). Satker 230159, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.971.811.000,- atau 82,86% dan capaian realisasi fisiknya 100%. Adapun Programnya adalah Program Perdagangan

Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan kapasitas Logistik Perdagangan. Adapun output yang dihasilkan adalah Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat yang berlokasi di Gunung Sari dengan Type D.

- b) Satker 235157, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,- pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.077.785.132,- atau 76,94%, sementara realisasi fisiknya 100%. Adapun Programnya adalah Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan kapasitas Logistik Perdagangan Adapun output yang dihasilkan adalah Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu Pembangunan pasar telah terlaksana dengan fisik 100% dan belanja administrasi kegiatan operasional seperti perjalanan dinas dan pembayaran honor pengelola keuangan.

- c) Satker 239289, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.992.750.000,- pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumbawa Barat, dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 3.399.850.000,- atau 85,15%, sementara realisasi fisiknya 100%. Adapun programnya adalah Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan kapasitas Logistik Perdagangan. Adapun output yang dihasilkan adalah Pembangunan Pasar Rakyat atau Revitalisasi Pasar yang pengalokasiannya di Seteluk.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada revitalisasi Pembangunan pasar Seteluk dengan jumlah 36 unit dan 2 unit kamar mandi telah terlaksana dengan fisik 100% dan belanja administrasi kegiatan operasional seperti perjalanan dinas dan pembayaran honor pengelola keuangan.

Untuk mengetahui lebih jelas capaian realisasi keuangan dan kinerja fisik dana Tugas Pembantuan Satker dilingkup pemerintah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3. 10 Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Satker pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi NTB TA. 2021 Triwulan IV

No	Kode Satker	Nomenklatur Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Anggaran	% Fisik
1	239242	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Barat	1,545,313,000	1,530,130,000	99.02	100
2	230340	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Timur	1,545,313,000	1,499,112,200	97.01	100
3	230576	Dinas Pertanian Kab. Sumbawa	595,850,000	528,821,875	88.75	100
4	239050	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bima	4,858,994,000	4,858,994,000	100.00	100
5	350330	Dinas Nakertrans Kab. Bima	7,543,876,000	7,537,933,000	99.92	100
6	230159	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Lombok Barat	6,000,000,000	4,971,811,000	82.86	100
7	235157	Dinas Perdagangan Kota Mataram	4,000,000,000	3,077,785,132	76.94	100
8	239289	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kab. Sumbawa Barat	3,992,750,000	3,399,850,000	85.15	100
TOTAL ALOKASI KABUPATEN/KOTA			30,082,096,000	27,404,437,207	91,10	100

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota pada tahun 2021 sebesar Rp.204.963.965.000,- dan sampai triwulan IV telah terealisasi Rp. 197.700.082.877,- atau 96,46% dengan realisasi fisik mencapai 99,17%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.70.849.733.000,- dengan realisasi sebesar Rp.69.208.899.655,- atau 97,68% dan realisasi fisik mencapai 94,27%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.104.032.136.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.101.086.746.015,- atau 97,17% dengan realisasi fisik sebesar 97,94%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.30.082.096.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.27.404.437.207,- atau 91,10% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Rata-rata penyerapan belanja satker Dekonsentrasi lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencapai 99,00% sampai dengan 31 Desember 2021, ada 2 Satker yang penyerapannya dibawah 90% yaitu Dinas Perdagangan (239077), dan Dinas Kesehatan (239005). Untuk Tugas Pembantuan lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat rata-rata penyerapan belanja satker telah mencapai 95% sampai dengan 31 desember 2021 dan Pemerintah Kabupaten/Kota rata-rata 90% sampai dengan 31 desember 2021. Dan ada satu Satker yang penyerapannya dibawah 90% yaitu satker Dinas Perdagangan Kota Mataram yaitu 76,94%, karena tidak bisa mengoptimalkal sisa tender yang disebabkan keterbatasan waktu.

Pagu anggaran dan penyerapan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi maupun kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun anggaran 2020, dimana pagu anggaran tahun 2020 untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp.274.325.113.000, dan pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.174.881.869.000,- mengalami penurunan sebesar Rp.99.443.244.000 atau 36,25%, yang terdiri dari dana dekonsentrasi untuk tahun 2020 sebesar Rp.95.879.543.000,- dan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp.70.849.33.000,- yang artinya mengalami penurunan sebesar Rp.25.029.810.000,- atau 26,10%, untuk dana Tugas Pembantuan dilingkup pemerintah provinsi pada tahun 2020 jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 158.445.915.000,- dan untuk tahun 2021 sebesar Rp.104.032.136.000,- ini yang artinya mengalami jumlah penurunan sebesar Rp.54.413.779.000,- atau 34,34%, dan sementara pagu anggaran Tugas Pembantuan pemerintah kabupaten/kota mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.19.999.655.000,- dan tahun 2021 sebesar Rp.30.082.096.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.10.082.441.000,- atau 33,52%. Adanya perbedaan atau penurunan ini dikarenakan adanya Refocusing anggaran dimana anggaran pendapatan belanja negara masih difokuskan pada penanganan Kesehatan dan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dan dunia usaha. Realokasi anggaran pada awal tahun dilakukan untuk mendukung vaksinasi gratis secara bertahap untuk seluruh lapisan masyarakat. Sehingga aktivitas masyarakat dapat lebih leluasa untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi, dan b) adanya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang diberlakukan oleh Pemerintah

Untuk itu ada beberapa rekomendasi atau Langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran antara lain; (1) Melakukan perbaikan perencanaan dengan segera menyusun kalender kegiatan, dengan melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan. (2) Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek dengan Pemetaan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang mampu dan berpengalaman dalam pengelolaan keuangan di setiap Satker termasuk kesiapan kapasitas teknis pelaksanaan (3) Melakukan

percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) dengan mengupayakan proses PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran dan Meningkatkan koordinasi antara satker-satker dengan Biro Pengadaan barang jasa selaku pelaksana pokja pengadaan barang jasa, (4) Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan secara aktif dan meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengendalian dan pengawasan internal.

4.2 SARAN

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana APBN baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, maka disarankan

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan penugasan supaya dapat mempercepat proses refocusing dan realokasi anggarannya serta penataan administrasi baik secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi (*video conference*) maupun media lainnya;
2. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;
3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara *up to date* sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan;

4. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu membangun sinergi dengan OPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan memulai mensupervisi untuk penyelarasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan RPJMD Nusa Tenggara Barat sesuai petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi dan Evaluasi kebijakan program dan kegiatan;
5. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku penyusun Laporan Triwulanan perlu adanya pembentukan Tim Koordinasi Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah terealisasi untuk mengetahui area yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikannya.